

## **Peningkatan Kompetensi Guru SMK pada Mata Pelajaran Akuntansi Pemerintahan**

<sup>1</sup>**Cantika Sari Siregar**  
Program Studi Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi, Universitas  
Negeri Surabaya  
Jalan Ketintang, Surabaya  
60231, Indonesia  
[cantikasiregar@unesa.ac.id](mailto:cantikasiregar@unesa.ac.id)

<sup>2</sup>**Loggar Bhilawa\***  
Program Studi Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi, Universitas  
Negeri Surabaya  
Jalan Ketintang, Surabaya  
60231, Indonesia  
[loggarbhilawa@unesa.ac.id](mailto:loggarbhilawa@unesa.ac.id)

<sup>3</sup>**Mariana**  
Program Studi Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi, Universitas  
Negeri Surabaya  
Jalan Ketintang, Surabaya  
60231, Indonesia  
[mariana@unesa.ac.id](mailto:mariana@unesa.ac.id)

<sup>4</sup>**Rohmawati Kusumaningtias**  
Program Studi Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi, Universitas  
Negeri Surabaya  
Jalan Ketintang, Surabaya  
60231, Indonesia  
[rohmawatikusumaningtias@unesa.ac.id](mailto:rohmawatikusumaningtias@unesa.ac.id)

<sup>5</sup>**Dian Anita Nuswantara**  
Program Studi Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi, Universitas  
Negeri Surabaya  
Jalan Ketintang, Surabaya  
60231, Indonesia  
[diananita@unesa.ac.id](mailto:diananita@unesa.ac.id)

### **Abstract**

*Education is a key element that has a role in improving the quality of life of the nation. With the issuance of Regulation of the Director General of Primary and Secondary Education Number 07 / D.D5 / KK / 2018 on June 7, 2018 concerning Curriculum Structure of SMK and MAK. The regulation includes Government Accounting subjects in the SMK standard curriculum. The purpose of this dedication is to increase the knowledge of educators to understand Government Accounting subjects through training. The results after the training there was a significant increase of 85%*

**Keywords:** *accounting government; workshop; MGMP; SMK*

### **Abstrak**

Pendidikan merupakan elemen kunci yang berperan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Struktur Kurikulum SMK dan MAK. Peraturan tersebut menyertakan mata pelajaran Akuntansi Pemerintahan dalam kurikulum standar SMK. Tujuan dari pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan pendidik untuk memahami mata pelajaran Akuntansi Pemerintahan melalui pelatihan. Hasil setelah dilakukan pelatihan terdapat kenaikan yang signifikan yaitu 85%.

**Kata kunci:** akuntansi pemerintah; diklat; MGMP; SMK

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan elemen kunci yang berperan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa (Wulandari & Rohayati, 2015). Salah satu tingkatan pendidikan yang bersifat khusus adalah sekolah menengah kejuruan (SMK). Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan dari penyelenggaraan SMK adalah mempersiapkan seseorang untuk bekerja dalam bidang spesifik, sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) (Jaya, 2012; Mulyani, 2011). Namun, adanya penerapan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa perlu mendapatkan perhatian bagi perjalanan kurikulum SMK. Undang-undang tersebut mulai diaplikasikan pada tahun 2015, yang memberikan kewenangan pengolahan desa melalui APBN dengan anggaran senilai satu milyar untuk setiap desa (Hadi, 2015). Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik No. 17 Tahun 2017 tentang Kode Nama dan Wilayah Kerja Statistik,

maenyebutkan bahwa wilayah administrasi desa dalam kategori kelurahan berjumlah 82.395. Sehingga total dana yang tersalurkan bisa mencapai sekitar 80 Triliun. Maka, diperlukan perbaikan sumber daya manusia, salah satunya melalui intervensi dari pendidikan level menengah.

Kondisi tersebut mendapatkan respon cepat dari Kemendikbud, dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Struktur Kurikulum SMK dan MAK. Peraturan tersebut menyertakan mata pelajaran Akuntansi Pemerintahan dalam kurikulum standar SMK. Penyediaan kesiapan sumber daya manusia melalui lulusan SMK diharapkan memberikan dukungan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan desa. Selain itu, keahlian akuntansi pemerintahan dapat diterapkan di lembaga lainnya, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, ataupun bentuk organisasi massa.

Siswa SMK diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dirinya sehingga mampu beradaptasi pada dunia nyata, di DUDI ataupun pada jenjang pemerintahan. Harapan peningkatan potensi lulusan SMK ini menjadi semakin tinggi, karena pada kenyataannya menurut data BPS, pada Februari 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih didominasi oleh lulusan SMK sekitar 8,92% (Priambudi, 2018). Maka, tuntutan kemandirian lulusan SMK harus mampu mendukung pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas (Wijaya, 2007). Melalui revitalisasi kurikulum dengan memasukkan akuntansi pemerintahan sebagai bekal lulusan SMK untuk berkarya sebagai individu yang berkontribusi bagi perbaikan peradaban bangsa Indonesia.

Namun, harapan tersebut sedikit pesimis terwujud, karena jumlah guru produktif hanya sekitar 22% dari total sekitar 13.710 SMK di Indonesia (Ratnasari, 2018). Guru produktif merupakan guru mata pelajaran jurusan yang bersifat spesifik. Sedangkan sisanya, 78% merupakan guru mata pelajaran umum, seperti Bahasa, Agama, dan Kewarganegaraan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi guru produktif secara kualitas dan kuantitas memerlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari universitas sebagai penyedia keilmuan tingkat tertinggi.

Disertakannya akuntansi pemerintahan yang merupakan upaya penyelarasan kurikulum yang sejalan dengan tujuan revitalisasi yang dicanangkan melalui Inpres No. 9 Tahun 2016 untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia, serta searah dengan kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*), di DUDI ataupun pemerintahan. Mengenai kondisi kedua mata pelajaran tersebut di SMK Surabaya, Pak Bagus (Ketua MGMP SMK Akuntansi wilayah Surabaya) menguraikan:

“...kalo akuntansi pemerintahan, memang sebenarnya pelajaran produktif akuntansi, sepengetahuan saya ada, dulu di S1 ada akuntansi sektor publik, sekarang diubah menjadi akuntansi pemerintahan. Untuk yang akuntansi pemerintahan, dimasukkan ke produktif akuntansi, sehingga menjadi tanggungan akuntansi, yang sebelumnya ndak ada, untuk tahun ini ada” (Pak Bagus, 7 Agustus 2018).

“...Kita mulai nyusun, belum (disusun), kalau memang dibantu nyusun nggih alhamdulillah. Silabus untuk akuntansi pemerintahan. Nah itu masalahnya kita (tim MGMP) sudah pernah ketemu di SMK untuk menyusun dua matpel itu, e, berhubung waktunya kan mendesak, kita bawa tugasnya melanjutkan di rumahnya masing-masing, sampai sekarang ndak selesai. Nggih memang kalo dibantu, malah

alhamdulillah, memang kita (pendidik) dikasih (oleh Kemendikbud) kebebasan untuk menyusun silabus untuk K-2017 ini” (Pak Bagus, 7 Agustus 2018).

Kondisi mata pelajaran akuntansi pemerintahan di atas menunjukkan bahwa para pendidik belum siap untuk mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan guru produktif pada mata pelajaran tersebut belum linier dengan keahlian yang dimiliki. Mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran yang baru, sehingga tenaga pendidik yang dimiliki selama ini belum berpengalaman dalam mengajarkannya. Ketidaksiapan tersebut dapat berpengaruh pada transfer keilmuan kepada peserta didik. Penelitian yang dilakukan oleh Fandhilah (2015) menyebutkan bahwa diperlukan motivasi aktif dari para pendidik, pada mata pelajaran dengan kategori baru, untuk merangsang antusiasme peserta didik. Maka, pendidik mutlak harus memahami dan menerapkan terlebih dahulu detail dari mata pelajaran tersebut, sehingga nantinya mudah menstimulasi keaktifan peserta didik.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa mata pelajaran akuntansi pemerintahan belum siap diimplementasikan oleh para pendidik. Padahal mata pelajaran tersebut harus diimplementasikan segera. Kebutuhan terhadap kompetensi pendidik (guru produktif), kurikulum, dan bahan ajar mendesak untuk dipenuhi.

## METODE

Diklat dan workshop penyusunan kurikulum mata pelajaran akuntansi pemerintahan dilakukan melalui tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 1 Rencana Kegiatan

Tahap	Keterangan	Kegiatan	Indikator Capaian	Tugas Anggota
1	Memahami tujuan kurikulum mata pelajaran akuntansi pemerintah	- Mempelajari standar kurikulum untuk mata pelajaran Akuntansi Pemerintahan - Diskusi dengan ketua tim MGMP - Pemetaan sarana dan prasarana kebutuhan kurikulum	Pokok-pokok utama dalam menyusun modul pembelajaran mata pelajaran	Diskusi bersama: - Akuntansi pemerintahan (Loggar, Dian, Tias, Cantika) - Kurikulum (Mariana)
2	Menyusun modul pembelajaran akuntansi pemerintah	- Mengumpulkan literatur - Menyesuaikan dengan tujuan kurikulum mata pelajaran - Menyusun modul pembelajaran	Modul pembelajaran mata pelajaran Akuntansi Pemerintahan. Modul digunakan untuk menyusun kebutuhan guru dan agenda diklat	Penyusunan bersama: - Akuntansi pemerintahan (Loggar, Dian, Tias, Cantika) - Evaluasi Kurikulum (Mariana)
3	Menyusun agenda diklat	Membagi materi pembelajaran dalam beberapa pertemuan	Agenda (jadwal) diklat	Tim peneliti bersama ketua MGMP

Tahap	Keterangan	Kegiatan	Indikator Capaian	Tugas Anggota
4	Pelaksanaan diklat untuk mata pelajaran akuntansi pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pretest</li> <li>- Pemaparan materi</li> <li>- Diskusi</li> <li>- Postest</li> <li>- Evaluasi bersama</li> </ul>	Pemahaman peserta diklat mencapai 85%  Angket hasil evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim peneliti mendatangkan ahli</li> <li>- Tim pembantu untuk menyiapkan keperluan diklat</li> </ul>

Berdasarkan tabel di atas, tim MGMP Akuntansi wilayah Surabaya bertugas untuk menguraikan dan berdiskusi secara aktif mengenai kebutuhan mata pelajaran akuntansi pemerintahan. Partisipasi tim MGMP ini berlangsung selama masa PKM. Hal ini dilakukan supaya terdapat sinkronisasi program pengabdian dengan kurikulum tingkat SMK, sehingga PKM tepat sasaran sesuai dengan standar nasional pendidikan, berupaya untuk menghasilkan siswa mandiri dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Pelaksanaan PKM ini dirancang untuk menyiapkan dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik produktif di SMK. Pelaksanaan evaluasi program dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, evaluasi berlangsung selama masa PKM berupa *post-test* selama pelaksanaan diklat dan penerapan penyusunan kurikulum dalam bentuk workshop. Kedua bentuk dalam tahap ini menyajikan ukuran penilaian keberhasilan secara kuantitatif yang dapat terlihat dan diberikan penyelesaian ketika terjadi permasalahan. Tahap kedua dilaksanakan setelah PKM berakhir berupa pemantauan dan diskusi tingkat keberhasilan pelaksanaan transfer ilmu dari tenaga pendidik kepada peserta didik SMK secara nyata. Permasalahan yang timbul selama pelaksanaan tahap kedua akan diselesaikan bersama antara tim MGMP dan tim PKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini kami akan menjelaskan kemajuan pekerjaan PKM sesuai dengan progress di lapangan sebagai berikut:

Pada tahap pertama, koordinasi awal dilakukan dengan mempelajari kurikulum mata pelajaran akuntansi pemerintahan dengan melakukan diskusi internal untuk menghasilkan pokok-pokok utama dalam menyusun modul pembelajaran. Melalui diskusi pada tahap pertama menghasilkan pokok-pokok utama dalam mata pelajaran akuntansi pemerintahan meliputi:

1. Lingkungan pemerintah Indonesia
2. Prinsip Dasar dan Gambaran Umum Proses Akuntansi Pemerintahan
3. Definisi Akun serta Metode Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan
4. Sistem Akuntansi Pemerintah di Indonesia

Pada tahap kedua, seluruh anggota tim menyusun modul pembelajaran dengan mengumpulkan literature yang telah disesuaikan dengan kurikulum. Pembahasan isi modul pembelajaran mata pelajaran akuntansi pemerintahan yang digunakan untuk menyusun kebutuhan guru dan agenda diklat. Bab I Desa dan Keuangan Desa, Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Bab III Penganggaran Keuangan Desa, Bab IV Pelaksanaan Keuangan Desa, Bab V Penatausahaan Keuangan Desa, Bab VI Pengawasan Keuangan Desa, dan Bab Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. (modul lampiran).

Tabel 2 Pembagian Kerja

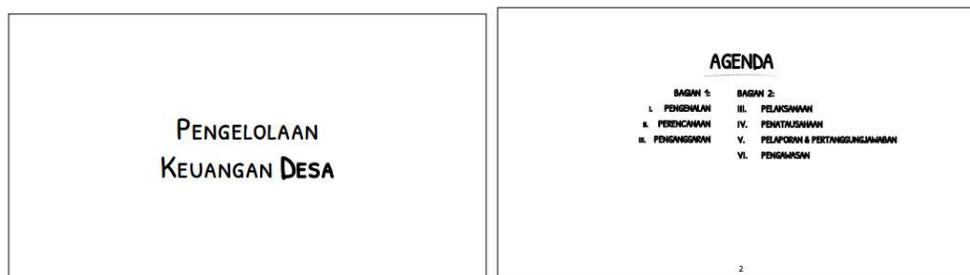
No	Nama	Topik
1	Cantika Sari Siregar	Bab I Desa dan Keuangan Desa, Bab II Perencanaan Pembangunan Desa
2	Loggar Bhilawa	Bab III Penganggaran Keuangan Desa, Bab IV Pelaksanaan Keuangan Desa
3	Dian Anita Nuswantara	Bab V Penatausahaan Keuangan Desa,
4	Rohmawati Kusumaningias	Bab VI Pengawasan Keuangan Desa,
5	Mariana	Bab VII Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Pada tahap ketiga, merupakan persiapan pelaksanaan diklat yaitu membuat rundown acara yang dibagi menjadi dua sesi pembicara dengan narasumber Ibu Ambarwati Kusumaningsih dan Ibu Mariana, acara dimulai pada pukul 07.30 WIB yang diawali dengan registrasi peserta.

Tabel 3 Rundown acara

Rundown 14 Sept 2019			
Waktu	Kegiatan	Lokasi	PJ
06.30 - 07.30	Persiapan Panitia	Audit G6	Panitia
07.30 - 08.45	Registrasi Peserta	Depan Audit G6	Panitia
08.45 - 09.45	Materi I	Audit G6	Bu Ambar
09.45 - 10.15	Tanya Jawab Materi I	Audit G6	Bu Ambar
10.15 - 10.30	Istirahat	Audit G6	Panitia
10.30 - 11.30	Materi II	Audit G6	Bu Mariana
11.30 - 12.00	Tanya Jawab Materi II	Depan Audit G6	Bu Mariana
12.00 - 13.00	Pembagian Makan Siang	Depan Audit G6	Panitia

Sebelumnya kami telah membagi topik diklat dalam 2 materi kepada narasumber, dalam hal ini Ibu Ambarwati Kusumaningsih akan membawakan materi pertama mengenai pengelolaan keuangan desa.



Gambar 1. Materi Sesi I Pengelolaan Keuangan Desa

Selanjutnya pada sesi kedua diisi oleh Ibu Mariana, dengan materi pengelolaan keuangan desa yang lebih menitikberatkan pada pelaporan keuangan desa.





Gambar 4. Pengarahan pelaksanaan pre-test

Agenda ketiga adalah diskusi/tanya jawab. Agar proses diklat berjalan dengan interaktif dari sisi peserta dan narasumber maka perlu dilakukan sesi tanya jawab/diskusi. Dalam hal ini banyak sekali peserta yang antusias melakukannya.



Gambar 5. Pelaksanaan diskusi diklat pada Guru-Guru

Agenda ke empat adalah dilakukan post-test, setelah di awal pelatihan dilakukan post-test, maka untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan pelatihan ini perlu dilakukan post-test. Sebelum dilakukannya pelatihan, hampir 80% peserta mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Namun pada post test ternyata lebih dari 85% peserta mendapatkan nilai di atas 70.

Agenda kelima adalah evaluasi bersama, dimana pada agenda ini dilakukan review kembali dari apa saja yang telah dilakukan bersama oleh narasumber dengan peserta. Pada tahap ini kami juga menyebarkan angket kepada peserta untuk mengevaluasi proses pelatihan ini.

Berdasarkan angket yang diisi oleh peserta pelatihan peningkatan kompetensi guru SMK pada mata pelajaran akuntansi pemerintahan, sebagian menyatakan puas karena materi yang disampaikan dapat membantu proses pengajaran di kelas dan khususnya di mata pelajaran akuntansi keuangan desa. Disamping itu, pelatihan ini dirasakan sangat efektif oleh peserta

dinilai dari materi, waktu dan metode pelaksanaannya. Melalui angket ini dapat dilihat bahwasanya acara pelatihan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa diklat/workshop penyusunan kurikulum mata pelajaran akuntansi pemerintah, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu pengembangan materi akuntansi pemerintah bagi guru-guru melalui diklat untuk meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran dan kebaruan ilmu.
2. Pengembangan modul harus sebagai panduan bagi guru-guru untuk mengajar.
3. Program pelatihan dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta pelatihan menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pelatihan dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir.

Berdasarkan hasil diklat/workshop penyusunan kurikulum mata pelajaran akuntansi pemerintah, dapat kami sarankan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan *refreshment* secara berkala mengenai akuntansi pemerintah kepada guru-guru agar lebih matang.
2. Waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara maksimal, tentunya dengan konsekuensi penambahan biaya pelaksanaan.
3. Adanya kegiatan pelatihan selanjutnya mengenai topik Akuntansi Pemerintahan seperti sistem keuangan desa (siskeudes).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Fandhilah, F. (2015). Model Penerimaan dan Penggunaan Program Aplikasi Akuntansi pada Siswa SMK Studi Kasus SMK Yadika 1 dan SMK Yadika 2 Jakarta Barat. *Jurnal Bianglala Informatika*, 3(2), 10–18.
- [2] Hadi, B. (2015). Tantangan Penerapan Kurikulum Akuntansi Pemerintahan untuk SMK Kelompok Keahlian Bisnis dan Manajemen dengan Adanya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan* (pp. 564–573).
- [3] Jatmoko, D. (2013). Relevansi Kurikulum SMK Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan terhadap Kebutuhan Dunia Industri di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 3(1), 1–13.
- [4] Jaya, H. (2012). Pengembangan Laboratorium Virtual Untuk Kegiatan Praktikum Dan Memfasilitasi Pendidikan Karakter di SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 2(1), 81–90.
- [5] Mulyani, E. (2011). Model Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Dasar dan Menengah. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 8(1), 1–18. Retrieved from <http://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/view/705>
- [6] Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Struktur Kurikulum SMK dan MAK
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- [8] Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 66 Tahun 2016 Tentang Kode Nama dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016.
- [9] Priambudi, B. (2018). BPS: Jumlah Pengangguran Terbuka Berkurang, Terbanyak dari Lulusan SMK. *Tribunnews.Com*, p. 1.
- [10] Rahmadian, M. C. (2015). Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dengan Software Accurate pada Perusahaan Manufaktur. In *Seminar Nasional Aplikasi dan Pengembangan Teknologi Informasi* (pp. 1–4). <https://doi.org/10.15713/ins.mmj.3>
- [11] Rahmawati, M. (2015). Peran Aplikasi Komputer Berbasis Akuntansi untuk Badan Usaha dalam Perspektif Sistem Informasi. *Perspektif*, 13(2), 172–183. Retrieved from <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/921>
- [12] Ratnasari, E. D. (2018). BPS Lulusan SMK Banyak Menganggur Sepanjang 2017. *CNN Indonesia*, p. 1.
- [13] Sukardi, T., & Hargiyanto, P. (2007). Peran Bursa Kerja Khusus Sebagai Upaya Penempatan Lulusan SMK Dalam Rangka Terwujudnya Link and Match Antara Sekolah Dengan Dunia Industri. *JPTK*, 16(2), 141–163. <https://doi.org/10.15713/ins.mmj.3>
- [14] Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [15] Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [16] Wijaya, T. (2007). Hubungan Adversity Intelligence dengan Intensi Berwirausaha ( Studi Empiris pada Siswa SMKN 7 Yogyakarta ). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 9(2), 117–127.
- [17] Wulandari, N., & Rohayati, S. (2015). Pengaruh Computer Knowlegde , Computer Attitude , Dan Fasilitas Laboratorium Komputer Terhadap Hasil Belajar Komputer Akuntansi Siswa Kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 3(2), 1–10.